

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT dari analisis kinerja pendapatan yang diukur dari rasio varians (selisih) pendapatan terjadi selisih kurang, rasio kemandirian sebesar 52% memiliki kriteria sangat kurang, rasio ketergantungan sebesar 73% memiliki kriteria sangat tinggi, rasio derajat desentralisasi fiscal sebesar 27% memiliki kriteria sedang, rasio tingkat efektifitas sebesar 101% memiliki kriteria sangat tinggi.
2. Kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT dari analisis kinerja belanja daerah yang diukur dari rasio varians (selisih) belanja terjadi selisih kurang, rasio keserasian belanja, penggunaan dana lebih banyak untuk belanja operasi sebesar 73% dari pada untuk belanja modal sebesar 16,55%, rasio aktivitas, penggunaan dana lebih banyak untuk belanja tidak langsung sebesar 63,52% daripada untuk belanja langsung sebesar 36,48%. Rasio tingkat efisiensi sebesar 95% memiliki kriteria kurang efisien.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan menjaga komitmen untuk terus berusaha untuk menggali potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli daerah dan mengurangi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
2. Pemerintah Provinsi NTT hendaknya tidak selalu mengandalkan sumber-sumber pendapatan Non PAD sehingga mengurangi ketergantungan kepada pihak luar.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat melakukan perencanaan anggaran belanja dengan baik sehingga tidak mengindikasikan adanya pemborosan dalam penggunaan anggaran.
4. Proporsi pengalokasian Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan agar jumlahnya signifikan dengan pos-pos belanja daerah lainnya agar tercipta pelayanan publik yang maksimal sehingga ditargetkan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I, 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Darise Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001, *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto. *Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003 – 2007*.
- I Putu Miartana, *Evaluasi Kinerja Rasio-Rasio Keuangan Daerah di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2010 – 2014*.
- Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan .Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM 1991
Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, STIM YKPN. Yogyakarta.
- Niken Marita Pratiwi, *Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2014*.
- Nirzawan. 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP YKPN.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Profil Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT. <http://www.bppkad-ntt.com/> .2018/09/17.09:00
- Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik. <http://ntt.bps.go.id>. 2018/09/15.10:00
- Sujarweni, Wiratna V. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. 2015. Pustaka Baru. Yogyakarta.
- Sujarweni, Wiratna V. *Akuntansi Sektor Publik*. 2015. Pustaka Baru. Yogyakarta.

Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.